KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Anggarkan Pengharum Ruangan 2,6 M: DPR Bau Banget Ya...
Tanggal : Sabtu, 09 Januari 2016
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 1-9

Anggarkan Pengharum Ruangan 2,6 M

DPR Bau Banget Ya...

DPR sepertinya sudah sungguh-sungguh bau. Soalnya, untuk pewangi ruangan saja, DPR akan menghabiskan anggaran sebesar Rp 2,62 miliar.

Pengadaan pewangi ruangan itu masuk dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun Anggaran 2016. Koordinator Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Apung Widadi menyebut, Rp 2,6 miliar itu untuk setahun. "Artinya, setiap bulan, duit yang harus dikeluarkan untuk pewangi ruangan sebesar Rp 218.770.834," kata Apung, kemarin.

Rp 2,6 miliar itu, lanjut Apung, bakal digunakan untuk pengadaan 1.110 alat pengharum ruangan, 385 pengharum urinoir, serta 242 unit tisu dan tempatnya. Padahal, alat pengharum ruangan dan pengharum urinoir itu tidak diganti setiap bulan.

Selain itu, dana anggaran itu nantinya juga akan digunakan untuk membeli 112 cairan pembersih dudukan kloset, 164 tempat sampah khusus pembalut wanita, dan pewangi untuk acara pidato negara. "Acara pidato itu ada empat kali dalam setahun," imbuhnya.

Bukan cuma pengharum ruangan. Fitra juga menemukan proyek-proyek lain yang dinilai tak wajar. Sekjen Fitra Yenny Sucipto mengungkapkan beberapa di antaranya. Pertama, pembangunan komplek Mewah DPR yang mencapai Rp 570 miliar. Terdiri dari gedung, alun-alun Demokrasi, dan klinik bagi diri dan keluarga anggota dewan.

"Padahal, belum ada dokumen perencanaan resmi dari arsitek, kementrian PU ataupun belum ada

BERSAMBUNG KE HAL 9

DPR Bau Banget Ya...

... DARI HALAMAN 1

Amdal dan izin dari Pemprov DKI Jakarta," jelas dia.

Kemudian, rumah jabatan anggota yang mencapai Rp 106,144 miliar dengan tidak ada perincian peruntukan dalam RUP. Berikutnya, pemeliharaan rusa, baik untuk makan dan ongkos kesehatannya yang mencapai Rp 599,23 juta.

Kemudian, jasa kebersihan dengan tiga zona dengan luas dari 43.000-54.00 meter persegi. Zona A merupakan kawasan paling luas, yakni seluas 54.441,59 meter persegi, zona B memiliki luas 49.309,50 meter persegi, dan zona C seluas 43.588,25 meter persegi.

Zona A akan menghabiskan dana Rp 11.935.987. Sementara, zona B dan zona C memiliki dana anggaran yang sama, yakni Rp 10.541.667. Lalu, pengadaan dan perawatan kendaraan yang selama 2015 mengalami peningkatan drastis yakni Rp15,66 miliar dibandingkan dengan 2014 yang hanya Rp 2,27 miliar. Pada 2016, dana dianggarkan mencapai Rp 8,76 miliar.

Juga, pengadaan alat kesehatan dan obat Rp 7,2 miliar di mana setiap tahun memang mengalami peningkatan. Lalu, pakaian dinas yang mencapai Rp3,7 miliar atau naik dari nilai sebelumnya Rp3,4 miliar pada 2015.

Berikutnya, komputer pibadi untuk Sekretariat Jenderal DPR RI yang sebelumnya mencapai Rp 5 miliar pada tahun lalu, sedangkan untuk 2016 mencapai Rp2,6 miliar. Juga, pengadaan makanan dan minuman Rp1,04 miliar pada tahun ini.

Yang juga janggal adalah pengadaan treadmil test yang dilengkapi EKG besaran anggarannya mencapai Rp 984.420.000. Belum lagi untuk pengadaan alat echo kardiograf (alat diagnosis jantung berupa pencitraan) yang mencapai Rp 2 miliar. Sementara, untuk pengadaan multimedia proyektor besaran anggarannya yakni Rp 600 juta.

Di samping itu, DPR juga ingin melakukan pengadaan untuk alat elektronik lainnya, seperti PC dengan spesifikasi khusus untuk TV Parlemen sebesar Rp 900 juta, alat-perisalah portable sebesar Rp 3 miliar, scanner A3 berkecepatan tinggi sebesar Rp 900 juta, notebook/laptop Rp 950 juta, PC lengkap untuk unit kerja Setjen DPR sebesar Rp 2.691.240.000, dan antivirus internet berlisensi sebesar Rp 649.080.000.

Direktur Center For Budget Analysis (CBA), Ucok Sky Khadafi menyatakan, pengadaan pewangi ruangan itu mengada-ada. "Apa DPR sebegitu baunya, ya? Kan para anggota Dewan sudah wangi-wangi, pakai parfum mahal, tahan lama, pasti ruangan sudah wangi juga," katanya kepada *RM*, semalam. "Tapi DPR memang bau, bau duit, proyek ini empuk untuk bancakan."

Wakil Ketua DPR Fadli Zon membantah tuduhan pemborosan dan bancakan dalam proyek-proyek itu. "Enggak ada tuh bagi-bagi jatah anggota. Saya kira kalau ada tuduhan harus dibuktikan," kata Fadli, kemarin.

Untuk membantah tudingan itu, Fadli meminta Sekretaris Jenderal DPR RI sebagai kuasa anggaran agar transparan. "Saya mengusulkan agar dilibatkan lembaga-lembaga terkait untuk melakukan pengawasan seperti KPK sehingga proses dan prosedurnya transparan. Biar enggak ada tuduhan ini bagi-bagi proyek," ujar Fadli.

Sementara saat dicoba dikonfirmasi, Sekretaris Jenderal DPR Winantuningtyastiti tidak mengangkat telepon Rakyat Merdeka. Juga, tak membalas pesan singkat. ■ OKT